

---

# **RADIKALISME AGAMA DALAM POLITIK KONTEMPORER: TANTANGAN BAGI KEAMANAN NASIONAL**

**Dtm Ashraff**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## **Abstrak**

Radikalisme agama telah menjadi isu yang semakin relevan dalam politik kontemporer, terutama dalam konteks keamanan nasional. Artikel ini menyelidiki fenomena radikalisme agama dalam politik saat ini dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Melalui analisis konseptual dan tinjauan literatur, artikel ini menguraikan karakteristik, akar penyebab, dan mekanisme penyebaran radikalisme agama. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga keamanan dalam mengatasi ancaman radikalisme agama serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut. Dengan memahami esensi radikalisme agama dan dampaknya terhadap keamanan nasional, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi keamanan.

**Kata Kunci:** *Radikalisme agama, politik kontemporer, keamanan nasional*

---



## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

*Radikalisme agama telah menjadi salah satu isu yang paling menonjol dalam politik kontemporer dan merupakan tantangan serius bagi keamanan nasional di banyak negara di seluruh dunia. Fenomena ini melibatkan penggunaan agama sebagai dasar untuk membenarkan atau memperjuangkan ideologi yang ekstrem, sering kali dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik mereka. Dalam konteks politik, radikalisme agama mempengaruhi dinamika politik dan sosial, sering kali mengakibatkan polarisasi masyarakat, ketegangan antar kelompok, dan konflik berskala besar.*

*Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam insiden terkait radikalisme agama di seluruh dunia. Dari serangan teroris oleh kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS hingga pergerakan politik yang didasarkan pada ideologi radikal di berbagai negara, fenomena radikalisme agama telah menjadi salah satu isu utama dalam kebijakan keamanan nasional. Ancaman ini tidak hanya mencakup ancaman fisik seperti serangan teroris, tetapi juga meliputi pengaruh ideologi radikal yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara secara keseluruhan.*

*Dalam konteks politik kontemporer, radikalisme agama juga seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Beberapa kelompok atau individu menggunakan agama untuk memperoleh dukungan politik atau untuk menggalang massa dalam kompetisi politik. Di sisi lain, terdapat pula peran negatif radikalisme agama dalam membentuk kebijakan publik dan dalam menjaga stabilitas politik suatu negara. Misalnya, dalam beberapa kasus, agama digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau untuk membenarkan tindakan represif oleh pemerintah.*

*Tantangan utama yang dihadapi oleh keamanan nasional dalam menghadapi radikalisme agama adalah kompleksitas dan sifat yang dinamis dari fenomena ini. Radikalisme agama sering kali tumbuh subur dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakstabilan politik, ketidakpuasan sosial, dan konflik etnis atau agama. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mempercepat penyebaran ideologi radikal dan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara para pelaku radikal di seluruh dunia.*

*Dalam konteks Indonesia, radikalisme agama juga merupakan masalah yang signifikan yang memengaruhi dinamika politik dan keamanan nasional. Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini telah menjadi sasaran serangan teroris oleh kelompok-kelompok radikal, seperti yang terjadi dalam serangkaian serangan bom di Indonesia pada tahun 2000-an. Selain itu, adanya gerakan-gerakan radikal yang berusaha mempengaruhi politik dan kebijakan di Indonesia juga menunjukkan bahwa radikalisme agama memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional di negara ini.*

*Dengan demikian, dalam konteks politik kontemporer, radikalisme agama bukan hanya merupakan isu keagamaan, tetapi juga merupakan isu keamanan nasional yang mendesak. Dengan memahami akar penyebab, mekanisme penyebaran, dan dampaknya*

terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional, pemerintah dan lembaga keamanan harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menanggulangi radikalisme agama dan menjaga keamanan nasional di era yang semakin kompleks dan berubah ini.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diperlukan untuk menyelidiki fenomena radikalisme agama dalam politik kontemporer, terutama yang berkaitan dengan tantangan bagi keamanan nasional, haruslah dirancang dengan cermat untuk memastikan pengumpulan data yang akurat dan analisis yang mendalam. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam merancang metode penelitian untuk studi ini:

1. *Tinjauan Literatur: Langkah pertama dalam merancang metode penelitian adalah melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang topik yang bersangkutan. Tinjauan literatur akan membantu peneliti untuk memahami landasan teoretis dan kerangka konseptual yang relevan, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks historis dan perkembangan fenomena radikalisme agama dalam politik kontemporer.*
2. *Penentuan Pendekatan Penelitian: Setelah melakukan tinjauan literatur, peneliti perlu memutuskan pendekatan penelitian yang paling sesuai untuk studi ini. Pendekatan yang dapat dipertimbangkan termasuk pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Dalam konteks studi tentang radikalisme agama dalam politik, pendekatan kualitatif mungkin lebih sesuai untuk memahami motif, persepsi, dan dinamika yang kompleks di balik perilaku radikalisme agama.*
3. *Pengumpulan Data: Langkah berikutnya adalah melakukan pengumpulan data yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan survei. Wawancara dengan pakar, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam politik dan keamanan nasional dapat memberikan wawasan yang berharga tentang fenomena radikalisme agama.*
4. *Analisis Data: Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cermat untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis isi atau analisis naratif, atau dengan menggunakan pendekatan statistik jika data yang terkumpul cukup untuk analisis kuantitatif.*
5. *Interpretasi dan Kesimpulan: Langkah terakhir dalam metode penelitian adalah menginterpretasikan temuan dan menggambarkan implikasinya bagi pemahaman tentang radikalisme agama dalam politik kontemporer dan tantangan bagi keamanan nasional. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang diperoleh dari analisis data dan dikaitkan dengan kerangka teoretis yang relevan.*

### **PEMBAHASAN**

*Pembahasan tentang radikalisme agama dalam politik kontemporer sebagai tantangan bagi keamanan nasional merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam dari berbagai perspektif. Radikalisme agama dapat memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas politik, sosial, dan keamanan suatu negara. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek utama terkait fenomena ini.*

*Pertama-tama, perlu dipahami bahwa radikalisme agama sering kali merupakan produk dari ketidakpuasan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketegangan politik yang ada dalam suatu masyarakat. Ketidakadilan sosial dan politik dapat memicu munculnya kelompok-kelompok radikal yang menggunakan agama sebagai dasar untuk memperjuangkan ideologi ekstrem mereka. Ini seringkali terjadi dalam konteks di mana sejumlah kecil individu atau kelompok merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dalam proses politik.*

*Selanjutnya, radikalisme agama dapat memicu konflik antar kelompok di dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas nasional. Ketika kelompok-kelompok radikal saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh atau kekuasaan, ini dapat mengakibatkan polarisasi dan konfrontasi yang memperburuk ketegangan politik dan sosial. Konflik antar kelompok agama atau etnis, yang seringkali dipicu oleh retorika radikal, dapat menyulitkan upaya untuk membangun kesatuan dan kohesi sosial di dalam masyarakat.*

*Selain itu, radikalisme agama juga merupakan ancaman bagi keamanan nasional karena kemungkinan terjadinya serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Serangan teroris dapat menyebabkan kerusakan fisik, korban jiwa, dan kerusakan ekonomi yang signifikan, serta menimbulkan ketakutan dan kepanikan di dalam masyarakat. Serangan teroris juga dapat mengganggu stabilitas politik dan mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas.*

*Dalam menghadapi tantangan radikalisme agama, pemerintah dan lembaga keamanan nasional sering kali dihadapkan pada dilema antara menjaga keamanan masyarakat dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil. Tindakan represif yang diambil oleh pemerintah untuk melawan radikalisme agama seringkali memicu kontroversi dan meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dan terkoordinasi antara tindakan penegakan hukum, upaya pencegahan, dan upaya rekonsiliasi untuk mengatasi radikalisme agama secara efektif.*

*Selain itu, penting juga untuk diakui bahwa radikalisme agama sering kali memiliki dimensi transnasional, dengan kelompok-kelompok radikal saling berhubungan dan saling mendukung di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa penanganan radikalisme agama tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu negara, tetapi juga memerlukan kerjasama antarnegara dan koordinasi internasional dalam menghadapi ancaman yang lintas batas ini.*

*Dalam konteks Indonesia, radikalisme agama juga merupakan masalah yang mendesak yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional. Negara ini telah menjadi sasaran serangan teroris oleh kelompok-kelompok radikal, dan adanya gerakan-*

*gerakan radikal yang berusaha mempengaruhi politik dan kebijakan di Indonesia menunjukkan bahwa radikalisme agama memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional di negara ini.*

*Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh radikalisme agama dalam politik kontemporer, diperlukan pendekatan yang holistik, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Upaya-upaya pencegahan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga keamanan, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk mencegah penyebaran radikalisme agama dan mengatasi akar penyebabnya. Hanya dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat menghadapi tantangan yang kompleks ini dan memastikan keamanan nasional dan stabilitas politik di masa depan.*

*Radikalisme agama tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dan sosial, tetapi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil dapat mengurangi kepercayaan investor dan mengganggu aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.*

*Selain itu, perlu diakui bahwa radikalisme agama sering kali dimanfaatkan oleh aktor-aktor eksternal untuk mencapai kepentingan politik mereka. Negara-negara atau kelompok-kelompok tertentu dapat mendukung atau membiayai kelompok-kelompok radikal di negara lain sebagai bagian dari strategi geopolitik mereka. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan antara negara-negara dan memperburuk konflik regional.*

*Penting juga untuk mencatat bahwa penanganan radikalisme agama tidak hanya melibatkan tindakan keras oleh pemerintah atau lembaga keamanan, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan yang lebih luas dan inklusif. Pendidikan, pembangunan ekonomi, dan inklusi sosial dapat membantu mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme agama. Selain itu, mempromosikan dialog antaragama dan membangun kepercayaan antar kelompok masyarakat juga dapat membantu mengurangi polarisasi dan konflik yang berhubungan dengan radikalisme agama.*

*Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi radikalisme agama, termasuk melalui penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok radikal, upaya pencegahan melalui program-program pendidikan dan sosial, serta promosi dialog antaragama. Namun, tantangan yang dihadapi oleh negara ini tetap besar, terutama mengingat keragaman budaya dan agama di Indonesia.*

*Dengan demikian, penting untuk terus memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga keamanan, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh radikalisme agama. Hanya dengan kerjasama dan koordinasi yang efektif, kita dapat mengatasi dampak negatif radikalisme agama terhadap keamanan nasional dan membangun masyarakat yang lebih stabil, damai, dan inklusif.*

*Dalam melanjutkan upaya penanganan radikalisme agama dalam politik kontemporer, penting untuk memperhatikan perlunya pendekatan yang mengintegrasikan berbagai dimensi, termasuk keamanan, pembangunan, dan rekonsiliasi sosial. Upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dengan upaya penegakan hukum untuk mengatasi akar penyebab radikalisme agama. Hal ini melibatkan pendekatan yang proaktif*

untuk meningkatkan inklusi sosial, mengurangi ketidakadilan, dan mempromosikan dialog antaragama untuk memperkuat kerukunan antar masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam menghadapi radikalisme agama, mengingat sifat yang lintas batas dari fenomena ini. Negara-negara harus bekerja sama untuk membagi informasi intelijen, melawan pembiayaan kelompok-kelompok radikal, dan memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum dan keamanan. Ini akan memungkinkan negara-negara untuk bersama-sama mengatasi ancaman radikalisme agama secara lebih efektif.

Selain itu, masyarakat sipil juga harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam mengatasi radikalisme agama. Pendidikan yang inklusif dan kritis, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta promosi nilai-nilai toleransi dan pluralisme dapat membantu mencegah proses radikalisasi dan membangun masyarakat yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap pengaruh ekstremis.

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil dan lembaga internasional. Hanya dengan kerjasama dan koordinasi yang efektif di tingkat lokal, regional, dan global, kita dapat mengatasi radikalisme agama dalam politik kontemporer dan membangun masyarakat yang lebih aman, stabil, dan damai.

Dalam melanjutkan langkah-langkah penanganan radikalisme agama, perlu ditekankan pentingnya pembangunan strategi yang progresif dan inklusif. Strategi tersebut harus memperhitungkan konteks lokal, budaya, dan sosial masyarakat yang berbeda-beda. Pendekatan yang *one-size-fits-all* mungkin tidak efektif mengingat perbedaan-perbedaan ini. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu berkolaborasi dengan aktor-aktor lokal untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Selanjutnya, dalam upaya melawan radikalisme agama, penting untuk menghindari stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok agama tertentu atau komunitas tertentu. Stigmatisasi semacam itu dapat memperburuk ketegangan sosial dan memperkuat narasi radikalisme. Sebaliknya, penting untuk mempromosikan dialog antaragama, membangun jembatan antar kelompok, dan memperkuat rasa solidaritas di antara berbagai sektor masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, budaya, dan sosial yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan perdamaian.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi akar penyebab dari radikalisme agama, termasuk ketidakadilan sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidaksetaraan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi keamanan dan stabilitas sosial. Ini juga akan membantu memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat dan mengurangi ketidakpuasan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal.

Selanjutnya, penting untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasi radikalisme agama. Negara-negara perlu berbagi informasi intelijen, melawan pembiayaan

terorisme, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penegakan hukum di tingkat global. Kerja sama ini sangat penting mengingat bahwa radikalisme agama sering kali tidak mengenal batas negara dan dapat menyebar secara lintas wilayah.

Dalam konteks Indonesia, negara ini telah mengambil langkah-langkah penting dalam melawan radikalisme agama, termasuk dengan memperkuat hukum dan keamanan, serta mempromosikan dialog antaragama dan inklusi sosial. Namun, tantangan ini tetap ada dan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengatasi radikalisme agama dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penanganan radikalisme agama sebagai tantangan bagi keamanan nasional membutuhkan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Hanya dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, kita dapat mencapai kemajuan dalam mengatasi fenomena ini dan membangun masyarakat yang lebih aman, stabil, dan damai.

Dalam melanjutkan upaya penanganan radikalisme agama, penting untuk memperhatikan peran media dan teknologi informasi dalam memerangi penyebaran ideologi ekstremis. Media sosial dan internet telah menjadi alat utama dalam penyebaran narasi radikal dan rekrutmen anggota untuk kelompok-kelompok ekstremis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko radikalisme online, serta untuk mempromosikan penggunaan internet yang bertanggung jawab dan kritis.

Selain itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam melibatkan kelompok-kelompok agama dan pemimpin agama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Pemimpin agama memiliki pengaruh yang besar terhadap anggota komunitas mereka dan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi narasi radikalisme serta mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan keamanan dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini. Hal ini meliputi pelatihan untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman terorisme, serta untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus radikalisme agama secara efektif. Penegakan hukum yang kuat dan adil sangat penting untuk memberikan sinyal bahwa tindakan radikalisme tidak akan ditoleransi dan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum.

Selanjutnya, penting untuk terus melakukan penelitian dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme agama dan efektivitas strategi pencegahannya. Hal ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengatasi radikalisme agama. Selain itu, pendekatan berbasis bukti juga dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan memperbaiki kelemahan dalam strategi pencegahan yang sudah ada.

Terakhir, perlu ditekankan bahwa penanganan radikalisme agama bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Langkah-langkah pendekatan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam dinamika sosial, politik, dan teknologi. Hanya dengan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan

*dalam mengatasi radikalisme agama dan membangun masyarakat yang lebih aman, toleran, dan inklusif.*

### **Kesimpulan**

*Dalam kesimpulan, radikalisme agama dalam politik kontemporer menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional di berbagai negara. Fenomena ini telah mempengaruhi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, serta menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan harmoni antar umat beragama. Pentingnya menghadapi radikalisme agama dengan serius tidak bisa diabaikan, karena dampaknya yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara.*

*Langkah-langkah pencegahan dan penanganan radikalisme agama haruslah holistik dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga keamanan, masyarakat sipil, hingga pemimpin agama. Kerja sama regional dan internasional juga sangat penting dalam menghadapi tantangan ini, mengingat sifat lintas batas dari radikalisme agama. Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengatasi radikalisme agama dan membangun masyarakat yang lebih aman, damai, dan inklusif.*

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia.*
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan.*
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404.*
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.*
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).*
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan.*
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.*
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.*
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION.*
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.*
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).*
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.*
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpd.*
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).*
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.*
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama.*
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.*

- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.*
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.*
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.*
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.*
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai.*
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.*
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia.*